

## Pengaruh PAD, Belanja Modal, dan Ukuran Pemerintah terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten Ponorogo Tahun 2010 – 2021

Mike Amaradila<sup>1\*</sup>, Arif Hartono<sup>2</sup>, Titin Eka Ardiana<sup>3</sup>

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Ponorogo  
<sup>1,2,3</sup>Jl. Budi Utomo No.10, Ronowijayan, Kec. Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Kode Pos  
63471, Jawa Timur, Indonesia

Email Korespondensi: [mikeamaradila@gmail.com](mailto:mikeamaradila@gmail.com)\*

Dikirim : 20 Juli 2023

Diterima : 4 Oktober 2023

### ABSTRACT

*This study aims to examine and analyze the influence of Regional Own Revenue ( $X_1$ ), Capital Expenditure ( $X_2$ ), and Regional Government Measures ( $X_3$ ) on Regional Government Financial Performance in Ponorogo Regency in 2010 – 2021. The population in this study are in the Budget Realization Report and Balance Sheet Report. The technique used for sampling is the Non-Probability Sampling method. The analytical method used is multiple linear analysis using the SPSS version 22. The results of testing the first hypothesis in this study show that Regional own Revenue partially has a significant positive effect on regional financial performance. Second hypothesis in this study show that capital expenditure has a significant negative effect on regional financial performance. Third hypothesis in this study show that the size of local government has no effect on regional financial performance.*

*The results of the simultaneous test show that  $X_1$ ,  $X_2$ , and  $X_3$  have a significant effect on the Regional Financial Performance of Ponorogo Regency. The results of the coefficient of determination ( $R^2$ ) show  $X_1$ ,  $X_2$ , and  $X_3$  can simultaneously explain the Regional Financial Performance of Ponorogo Regency of 62.9% and the remaining 37.1% may be influenced by other variables outside the variables of this study.*

**Keywords:** Local Own Revenue, Capital Expenditure, Size of Local Government, Regional Financial Performance

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisa pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Ponorogo tahun 2010 – 2021. Populasi dalam penelitian ini adalah berupa data keuangan yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Neraca. Teknik yang digunakan untuk pengambilan sampel dengan metode *Non-Probability Sampling*. Jenis data yang digunakan merupakan data sekunder. Metode Analisa yang digunakan adalah analisis linier berganda menggunakan aplikasi SPSS versi 22. Hasil dari pengujian hipotesis pertama dalam penelitian ini menunjukkan Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Hasil pengujian hipotesis kedua dalam penelitian ini menunjukkan Belanja Modal berpengaruh negatif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Hasil pengujian hipotesis ketiga dalam penelitian ini menunjukkan Ukuran Pemerintah Daerah tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah.

Hasil uji simultan menunjukkan Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2010 – 2021. Hasil dari koefisien determinasi ( $R^2$ ) menunjukkan Pendapatan Asli Daerah ( $X_1$ ), Belanja Modal ( $X_2$ ), dan Ukuran Pemerintah Daerah ( $X_3$ ) secara bersamaan dapat menjelaskan Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2010 – 2021 sebesar 62,9% dan sisanya 37,1% mungkin dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel penelitian ini. **Kata Kunci** : Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, Kinerja Keuangan Daerah.

## A. PENDAHULUAN

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Berhasil atau tidaknya suatu penyelenggaraan pemerintahan dapat dilihat bagaimana kinerja keuangan daerah. Menurut (Rai, 2008) pengukuran kinerja berfungsi untuk menilai sukses atau tidaknya suatu organisasi, program, atau kegiatan. Pengukuran kinerja pada sektor publik diperlukan untuk menilai apakah pemerintah daerah sudah mampu mengelola keuangannya secara efektif.

Efektivitas keuangan suatu daerah merupakan kesesuaian dari capaian hasil kinerja keuangan dengan target yang telah direncanakan. Menurut (Mahmudi, 2019) salah satu indikator untuk pengukuran kinerja keuangan daerah dengan rasio efektivitas yang diukur dengan cara membandingkan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan anggaran penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Menurut (Ayu, 2018) pemerintah daerah dikatakan berhasil jika bisa merealisasikan Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang bersumber dari daerah itu sendiri sebagai wujud dari pelaksanaan otonomi daerah. Melalui pendapatan transfer, pemerintah pusat turut mendanai kebutuhan daerah yang gunakan untuk belanja dan pembiayaan.

Menurut (Antari & Sedana, 2018) belanja daerah juga ikut andil dalam memperoleh pendapatan daerah yang berasal dari potensi-potensi yang dimiliki daerah. Menurut (Halim, 2007) belanja daerah diprioritaskan untuk memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum serta mengembangkan sistem jaminan sosial untuk memudahkan penilaian kewajaran biaya suatu program atau kegiatan belanja menurut kelompok terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program kegiatan yang terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Sementara belanja langsung adalah belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program kegiatan yang terdiri belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal (Halim, 2007). Menurut (Antari & Sedana, 2018) salah satu kegiatan belanja modal yang menghasilkan sumber-sumber keuangan yaitu pembangunan infrastruktur berupa fasilitas umum. Pembangunan daerah merupakan pembangunan yang dipersiapkan dan dilaksanakan oleh daerah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mampu memberikan efektifitas terhadap penerimaan

pendapatan daerah. Bertambahnya aset daerah yang diperoleh dari belanja modal diharapkan dapat meningkatkan efektifitas kinerja daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo mengalami kenaikan salah satunya akibat adanya revitalisasi pasar tradisional dari tahun 2016. Sebanyak 10 pasar tradisional di Ponorogo pada tahun 2016 dan 2 pasar ditahun 2017 telah direvitalisasi. Berdasarkan berita dari koranmemo.com (<https://koranmemo.com/belasan-pasar-tradisional-rampung-revitalisasi/> diakses pada Februari 2021) revitalisasi pasar ini juga berimbas pada naiknya target penerimaan PAD pada sektor ini dari Rp 2,4 miliar ditahun 2016 menjadi Rp 2,6 miliar ditahun 2017. Revitalisasi pasar yang dilakukan akan berdampak positif untuk pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya pada retribusi daerah. Selain retribusi daerah, salah satu sumber PAD juga berasal dari Pajak Daerah. Peluncuran Sistem Informasi dan Pelayanan Pajak Terpadu (SIPANDA UNIK) untuk memudahkan wajib pajak melaksanakan kegiatan perpajakan daerah secara *online* dengan harap penerimaan pajak daerah segera terpenuhi. Menurut berita tersebut pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo telah melaksanakan beberapa program kerja yang dapat mempengaruhi kinerja dalam memperoleh pendapatan asli daerah.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang terjadi, maka peneliti mengambil judul tentang “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Daerah, dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten Ponorogo Tahun 2010 - 2021”

## B. KAJIAN LITERATUR

### Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja keuangan daerah merupakan indikator untuk mengukur sejauh mana pemerintah daerah berhasil melaksanakan tugasnya. Kinerja keuangan daerah bisa diukur menggunakan rasio-rasio keuangan daerah. Manfaat dari hasil perhitungan kinerja keuangan bisa menunjukkan kecenderungan yang terjadi dan bisa menjadi bahan evaluasi oleh pemerintah daerah mengenai hal-hal yang perlu dilakukan kedepannya.

Salah satu rasio keuangan yang menggambarkan kinerja keuangan daerah adalah rasio efektifitas PAD. Menurut (Halim, 2007) rasio efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam capaian target PAD yang direncanakan dan dibandingkan dengan target yang sudah ditetapkan. Berikut cara untuk menghitung tingkat efektifitas PAD:

$$\text{Rasio Efektifitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100 \%$$

Sumber : Halim (2007)

### Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang didapat dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah memiliki hak dan wewenang untuk memperoleh dan mengelola hasil pendapatan daerahnya sendiri sebagai wujud otonomi daerah. Pengembangan dan pengelolaan potensi asli daerah merupakan upaya pemerintah daerah untuk mewujudkan kinerja keuangan yang efektif. Unsur pendapatan asli daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain pendapatan asli daerah sah. Maka perhitungan pendapatan daerah adalah sebagai berikut :

$$\text{Pendapatan Asli Daerah} = \text{Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah} + \text{Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan} + \text{Lain-lain pendapatan asli daerah sah}$$

### Belanja Modal

Belanja modal termasuk belanja daerah yang masa manfaatnya lebih dari satu tahun dan menambah jumlah aset daerah. Kegiatan belanja modal harus dilakukan pengawasan, baik sebelum dan sesudah direalisasikan guna menghindari penyelewangan yang membuat belanja modal tidak sesuai standar. Aset tetap yang dihasilkan dari belanja modal dapat memudahkan mobilitas dan menumbuhkan ekonomi masyarakat. Jenis-jenis belanja modal dapat disimpulkan bahwa belanja modal merupakan pembelanjaan daerah yang digunakan untuk menambah aset tetap daerah yang manfaatnya lebih dari 12 bulan dan bertujuan untuk memperoleh aset tetap. Tujuan belanja modal untuk membiayai proyek-proyek daerah dalam wujud aset tetap berupa belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, serta belanja aset tetap lainnya yang masa manfaatnya lebih dari satu tahun. Kegiatan belanja modal dapat bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan dan kepentingan masyarakatnya. Belanja modal meliputi belanja tanah ; belanja peralatan dan mesin ; belanja gedung dan bangunan ; belanja jalan, irigasi dan jaringan ; belanja aset tetap lainnya ; dan belanja aset lainnya. Maka perhitungan belanja modal adalah sebagai berikut :

$$\text{Belanja Modal} = \text{Belanja Tanah} + \text{Belanja Peralatan dan Mesin} + \text{Belanja Gedung dan Bangunan} + \text{Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan} + \text{Belanja Aset Tetap Lainnya} + \text{Belanja Aset Lainnya}$$

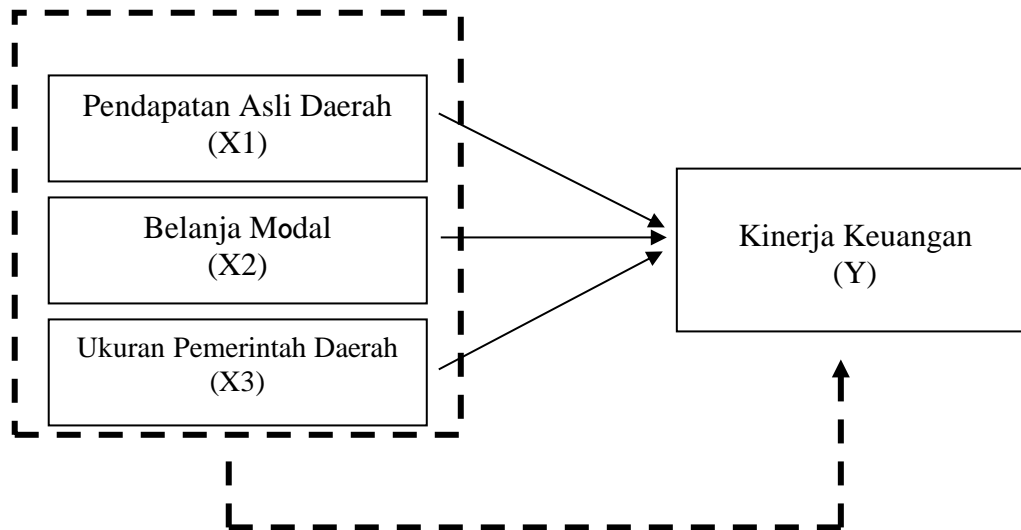
### Ukuran Pemerintah Daerah

Ukuran pemerintah daerah bisa dilihat dari total asetnya. Besar kecilnya ukuran pemerintah daerah dapat menentukan sejauh mana potensi pendapatan daerah diperoleh. Semakin besar ukuran pemerintah daerah, diharapkan semakin besar juga penerimaan pendapatannya secara mandiri, sehingga perolehan pendapatan asli daerah dapat terus ditingkatkan. Ukuran pemerintah daerah dapat diproksikan dengan total aset. Aset pemerintah daerah meliputi : Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan dan Aset Lainnya. Maka perhitungan ukuran pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

$$\text{Ukuran Pemerintah Daerah} = \text{Aset Lancar} + \text{Investasi Jangka Panjang} + \text{Aset Tetap} + \text{Dana Cadangan} + \text{Aset Lainnya}$$

### C. KERANGKA PEMIKIRAN

Dalam penelitian ini untuk menunjukkan suatu arah penyusunan dan untuk memperoleh gambaran yang jelas, maka penulis membuat kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Berfikir

### D. PELAKSANAAN DAN METODE

#### Metode Pengambilan Data

Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelola, Pendapatan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Ponorogo. Pemilihan lokasi sebagai tempat penelitian ini dilakukan secara sengaja dan terdapat keterkaitan masalah yang hendak diteliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data sekunder yang dibutuhkan adalah informasi keuangan dari laporan keuangan daerah selama 12 tahun periode penelitian. Data sekunder untuk penelitian ini didapatkan dari Badan Pengelola, Pendapatan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Ponorogo dan *website* [ppid.ponorogo.go.id](http://ppid.ponorogo.go.id).

#### Metode dan Alat Analisis Data

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah regresi linear berganda dan alat analisisnya menggunakan program SPSS.

#### Statistik Deskriptif

Menurut (Santoso, 2015) statistika deskriptif merupakan metode yang berhubungan dengan pengumpulan dan penyajian hasil pengamatan data sehingga memberikan informasi yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap data informasi tersebut. Penyampaian informasi tersebut berupa diagram, grafik, tabel, dan gambar.

#### Uji Asumsi Klasik

##### Uji Normalitas

Uji normalitas data dapat dilakukan dengan menggunakan uji Kolomogrov Smirnov satu arah. Pengambilan keputusan untuk mengetahui apakah suatu data mengikuti distribusi

normal atau tidak adalah dengan nilai signifikannya. Jika signifikannya  $>0,50$  maka variabel berdistribusi normal dan sebaliknya. Jika signifikannya  $<0,50$  maka variabel tidak berdistribusi normal (Ghozali, 2018).

### Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas adalah uji yang diperlukan untuk melihat ada atau tidaknya variabel independen yang mempunyai kesamaan antara variabel independen dalam suatu bentuk. Kesamaan antara variabel independen akan menyebabkan korelasi yang sangat kuat. Selain itu uji ini juga mencegah kebiasaan dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengaruh pada uji parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Jika VIF yang dihasilkan diantara 1 – 10 dan tolerance  $>0,100$  maka tidak terjadi multikolinieritas (Ghozali, 2018).

### Uji Autokorelasi

Menurut (Febry & Teofilus, 2020) masalah terbaik untuk mengatasi penelitian yang terjadi autokorelasi adalah dengan metode lain seperti Uji *Run Test*. Dasar keputusan apakah data terjadi autokorelasi atau tidak menggunakan Uji *Run Test* adalah sebagai berikut :

1. Jika nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih kecil dari ( $<$ ) 0,05 maka terdapat gejala autokorelasi
2. Sebaliknya, jika nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih besar dari ( $>$ ) 0,05 maka tidak terdapat gejala autokorelasi

### Uji Heterokedastisitas

Uji Heterokedastisitas menguji terjadinya perbedaan varian residual suatu periode pengamatan dari pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heterokedastisitas (Ghozali, 2018) Menurut (Purnomo, 2016) Uji Glejser dilakukan dengan cara meregresikan antara variabel independen dengan nilai absolut residualnya. Jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolut residual lebih dari 0,05 maka tidak terjadi masalah heterokedastisitas

### Analisis Linier Berganda

Menurut (Santoso, 2015) analisis regresi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar variabel pengaruh (variabel independen) terhadap variabel terpengaruh (variabel dependen). Model regresi berganda digunakan jika variabel independen lebih dari satu variabel. Berikut merupakan persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini :

Persamaan regresi linear berganda (*multiple regression analysis*) :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

- Y = Kinerja Keuangan Daerah  
 $\beta_1$  = Koefisien Pendapatan Asli Daerah  
 $\beta_2$  = Koefisien Belanja Modal  
 $\beta_3$  = Koefisien Ukuran Pemerintah Daerah  
X1 = Pendapatan Asli Daerah  
X2 = Belanja Modal  
X3 = Ukuran Pemerintah Daerah  
 $\alpha$  = Konstanta  
e = error

## Uji Hipotesis

### Uji t (Uji Parsial)

Uji statistik pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas (variabel independen) secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji t mempunyai nilai signifikan  $\alpha = 5\%$  (Ghozali, 2018).

### Uji F (Uji Simultan)

Menurut (Ghozali, 2018) menyatakan bahwa signifikansi bentuk regresi secara simultan diuji dengan mengetahui nilai signifikansi (sig) diaman jika nilai sig dibawah 0,05 maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

### Uji Koefisien Determinasi

Menurut (Ghozali, 2018) besarnya Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) berkisar antara angka 0 sampai dengan 1. Semakin mendekati angka 0 besarnya koefisien determinasi suatu persamaan regresi, maka semakin kecil pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen. Sebaliknya apabila besarnya koefisien determinasi suatu persamaan regresi mendekati angka 1 maka semakin besar pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen

## E. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelola, Pendapatan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Ponorogo. Pemilihan lokasi sebagai tempat penelitian ini dilakukan secara sengaja dan terdapat keterkaitan masalah yang hendak diteliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data sekunder yang dibutuhkan adalah informasi keuangan dari laporan keuangan daerah selama 12 tahun periode penelitian. Data sekunder untuk penelitian ini didapatkan dari Badan Pengelola, Pendapatan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Ponorogo dan website [ppid.ponorogo.go.id](http://ppid.ponorogo.go.id).

### Statistik Deskriptif

Berikut hasil Statistik Deskriptif :

Tabel 1  
Hasil Statistik Deskriptif

		Statistics			
		Pendapatan Asli Daerah (X1)	Belanja Modal (X2)	Ukuran Pemerintah Daerah (X3)	Kinerja Keuangan Daerah
N	Valid	12	12	12	12
	Missing	0	0	0	0
Mean		214591753600,92	267183469750,00	2510114991946,83	1,1137
Median		225403334854,50	251428632909,00	2422022980097,00	1,1116
Std. Deviation		105528506443,179	130197374351,493	298581774132,699	,11453
Minimum		48664624186	98140663137	2097142822965	,93

Maximum	376702757475	465255813619	3148789266894	1,37
---------	--------------	--------------	---------------	------

(Sumber : Output SPSS)

Variabel Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai terendah sebesar Rp48.664.624.186 dan nilai tertinggi sebesar Rp376.702.757.475 dengan nilai rata Rp214.591.753.600,92 dan standart deviasi sebesar Rp105.528.506.443,179. Variabel Belanja Modal nilai terendah sebesar Rp98.140.663.137 dan nilai tertinggi Rp465.255.813.619 dengan rata-rata Rp267.183.469.750,00 serta standart deviasi sebesar Rp130.197.374.351,493. Variabel Ukuran Pemerintah Daerah memiliki nilai terendah sebesar Rp2.097.142.822.965 dan nilai tertinggi sebesar Rp3.148.789.266.894 dengan rata-rata Rp2.510.114.991.946,83 serta standart deviasi sebesar Rp298.581.774.132,699. Variabel Kinerja Keuangan Daerah memiliki nilai terendah sebesar 0,93 dan nilai tertinggi sebesar 1,37 dengan rata-rata 1,1137 serta standart deviasi sebesar 0,11453

### Uji Asumsi Klasik

#### Uji Normalitas

Berikut ini hasil pengujian asumsi klasik normalitas residual dengan metode *One-Sample Kolmogorov-Smirnov* :

Tabel 2 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		12
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,000000
	Std. Deviation	,06981416
Most Extreme Differences	Absolute	,164
	Positive	,164
	Negative	-,120
Test Statistic		,164
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 <sup>c,d</sup>
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Berdasarkan hasil pengolahan data diatas dengan menggunakan uji asumsi klasik normalitas data dapat dilihat pada tabel uji normalitas residual dengan menggunakan uji *OneSample Kolmogorov-S* bahwa data yang diolah sejumlah 12 dan nilai signifikansi (*Asymp. Sig. (2-tailed)*) sebesar 0,200 maka nilai tersebut lebih besar dari 0,05 atau  $0,200 > 0,05$  maka data terdistribusi normal.

### Uji Multikolinearitas

Berikut hasil pengujian asumsi klasik multikolonieritas :

Tabel 3 Hasil Uji Multikolonieritas

Coefficients <sup>a</sup>	
---------------------------	--



Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF

(Sumber : *Output SPSS*)

Berdasarkan hasil pengolahan diatas uji multikoloniaritas setelah dilakukan pengujian maka dapat dilihat pengolahan tersebut menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal (BM), dan Ukuran Pemerintah Daerah (UPD) nilai tolerance berada > 0,10 dan untuk VIF <10,00. Nilai tolerance Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 0,405 ; nilai Belanja Modal (BM) nilai tolerance sebesar 0,419 ; dan nilai Ukuran Pemerintah Daerah (UPD) nilai tolerance sebesar 0,822, semua nilainya tolerance lebih dari 0,100. Sementara untuk hasil perhitungan *Variance Inflation Factor* (VIF) pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 2,466 ; nilai Belanja Modal (BM) sebesar 2,385 ; dan nilai Ukuran Pemerintah Daerah (UPD) sebesar 1,217. Semua variabel nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) kurang dari 10,00. Maka dapat disimpulkan bahwa diantara variabel independen tidak terjadi multikolonieritas karena tidak ada korelasi pada model regresi berganda yang dapat dilihat dari hasil penelitian diatas.

### Uji Autokorelasi

Berikut hasil pengelolaan data menggunakan uji *run test* :

Tabel 4 Uji Autokorelasi –

#### Uji Run Test

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value <sup>a</sup>	,00129
Cases < Test Value	6
Cases >= Test Value	6
Total Cases	12
Number of Runs	8
Z	,303
Asymp. Sig. (2-tailed)	,762
a. Median	

(Sumber : *Output SPSS*)

Hasil pengolahan uji autokorelasi dengan Uji *Run Test* telah dilihat bahwa nilai signifikansi (*Asymp. Sig. (2-tailed)*) sebesar 0,762 > 0,05. Sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji *run test* diatas, dapat disimpulkan maka tidak terjadi autokorelasi pada data penelitian ini.

**Uji Heterokedastisitas**

Berikut hasil Uji Glejser pada penelitian ini :

Tabel 5 Uji Glejser

Model	Coefficients <sup>a</sup>						Collinearity Statistics	Tolerance	VIF
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.			
	B	Std. Error	Beta						
1 (Constant)	,208	,123			1,686	,130			
Pendapatan Asli Daerah	-9,897E-14	,000	-,242	-,510	,624	,405	2,466		
Belanja Modal	-5,459E-14	,000	-,164	-,353	,733	,419	2,385		
Ukuran Pemerintah Daerah	-4,764E-14	,000	-,329	-,989	,352	,822	1,217		

a. Dependent Variable: Abs\_Res

(Sumber : *Output SPSS*)

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah signifikasinya sebesar 0,624 ( $>0,05$ ) ; Belanja Modal 0,733 ; dan Ukuran Pemerintah Daerah sebesar 0,352. Sebagaimana dasar pengambilan keputusan Uji Glejser semua variabel independen memiliki nilai signifikasi lebih dari 0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

**Analisis Liner Berganda**

Berikut hasil analisis liner berganda pada penelitian :

Tabel 6  
Pengolahan Data Uji Analisis Linear Berganda

Model	Coefficients <sup>a</sup>					
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	,985	,233			4,220	,003
Pendapatan Asli Daerah	,011	,004	,974		2,878	,021
Belanja Modal	-,008	,003	-,957		-2,878	,021
Ukuran Pemerintah Daerah	,001	,001	,132		,554	,595

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Daerah

(Sumber : *Output SPSS*)

Berdasarkan tabel pengelolaan data maka dapat disusun dengan persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :

$$Y=0,985+(0,011)X_1+(0,008)X_2+(0,001)X_3+e$$

Berdasarkan persamaan regresi diatas dapat dianalisis pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap kinerja keuangan daerah, yaitu:

1. Persamaan regresi linear berganda diketahui mempunyai konstanta 0,985 dengan tanda positif, jadi besarnya konstanta menunjukkan bahwa jika variabel independen Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Ukuran Pemerintah Daerah bernilai nol, maka nilai variabel dependen yaitu Kinerja Keuangan Daerah akan meningkat sebesar 0,985 satuan
2. Berdasarkan koefisien regresi untuk variabel Pendapatan Asli Daerah bernilai positif yaitu sebesar 0,011 artinya jika variabel Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan satu persen, nilai kinerja keuangan daerah juga mengalami kenaikan efektifitas sebesar 0,011%
3. Berdasarkan koefisien regresi untuk variabel Belanja Modal bernilai negatif sebesar -0,008 artinya jika variabel Belanja Modal mengalami penurunan satu persen maka kinerja keuangan daerah mengalami kenaikan efektifitas sebesar 0,008%
4. Berdasarkan koefisien regresi untuk variabel Ukuran Pemerintah Daerah bernilai positif yaitu sebesar 0,001 artinya jika variabel Ukuran Pemerintah Daerah mengalami kenaikan satu persen, maka kinerja keuangan daerah mengalami kenaikan efektifitas sebesar 0,001%

## Pengujian Hipotesis dan Pembahasan

### Uji t (Uji Parsial)

Berdasarkan hasil pengelolaan data dengan menggunakan program SPSS dapat dilihat pada tabel *coefficients* kolom *t* dan kolom *sig*. Hasil uji t (uji Parsial) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 7  
Hasil Uji t (Uji Parsial)

Berikut hasil pembahasan variabel secara parsial dengan uji t :

		Coefficients <sup>a</sup>				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,985	,233		4,220	,003
	Pendapatan Asli Daerah	,011	,004	,974	2,878	,021
	Belanja Modal	-	,003	-,957	-	,021
		,008			2,878	
	Ukuran Pemerintah Daerah	,001	,001	,132	,554	,595

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Daerah  
(Sumber :*Output SPSS*)

## Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Hipotesis pertama yang terdapat pada penelitian ini adalah menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah di Kabupaten Ponorogo Tahun 2010 – 2021.

Pengujian pertama yang digunakan untuk menganalisis hipotesis pertama yang terjadi pada regresi linear berganda menunjukkan nilai  $\beta_1$  atau koefisien regresi sebesar 0,011 artinya jika variabel Pendapatan Asli Daerah meningkat maka terjadi kenaikan efektifitas terhadap Kinerja Keuangan Daerah sebesar 1,1%. Berdasarkan hasil perhitungan uji hipotesis secara parsial variabel Pendapatan Asli Daerah menunjukkan hasil dari uji t yang diperoleh yaitu  $t_{hitung} > t_{tabel}$  atau  $2,878 > 2,306$  dan nilai Sig.  $0,021 < 0,050$ . Artinya Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap Kinerja Keuangan Daerah, sehingga dapat disimpulkan  $H_{01}$  ditolak dan  $H_{a1}$  diterima. Penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Saraswati & Rioni (2019) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah maka tingkat efektifitas penerimaannya semakin tinggi juga. Penelitian ini juga konsisten dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Antari & Sendana (2018) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Hal ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Azhar (2021) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah.

### **Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Daerah**

Hipotesis kedua yang terdapat pada penelitian ini adalah menguji pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Daerah di Kabupaten Ponorogo Tahun 2010 – 2021. Pengujian pertama yang digunakan untuk menganalisis hipotesis kedua yang terjadi pada regresi linear berganda menunjukkan nilai  $\beta_2$  atau koefisien regresi sebesar -0,008 artinya jika variabel Belanja Modal berkurang maka terjadi kenaikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah sebesar 0,8%. Berdasarkan hasil perhitungan uji hipotesis secara parsial variabel Belanja Modal menunjukkan hasil dari uji t yang diperoleh yaitu  $-t_{hitung} < -t_{tabel}$  atau  $-2,828 < -2,306$  dan nilai Sig.  $0,021 < 0,05$  sehingga  $H_{02}$  ditolak dan  $H_{a2}$  diterima. Artinya Belanja Modal berpengaruh negatif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan Antari & Sedana (2018) yang menunjukkan hasil bahwa belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Belanja modal bisa diartikan kegiatan investasi pemerintah daerah, namun bukan bertujuan mencari profit. Kegiatan belanja modal yang dilakukan pemerintah akan menghasilkan sumber-sumber keuangan daerah beberapa tahun kemudian dan mampu memberikan kontribusi terhadap penerimaan pendapatan daerah.

### **Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah**

Hipotesis ketiga yang terdapat pada penelitian ini adalah menguji pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah di Kabupaten Ponorogo Tahun 2010 – 2021. Berdasarkan hasil perhitungan uji hipotesis secara parsial variabel Ukuran Pemerintah Daerah menunjukkan hasil dari uji t yang diperoleh yaitu  $t_{hitung} < t_{tabel}$  atau  $0,554 < 2,306$  dan nilai Sig.  $0,595 > 0,050$  Sehingga  $H_{03}$  diterima dan  $H_{a3}$  ditolak. Artinya Ukuran Pemerintah Daerah tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Saraswati & Rioni (2019) yang menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah, sehingga total aset belum bisa memberikan kontribusi atau pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari & Mustanda (2019) yaitu Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Faktor lain yang mengakibatkan tidak berpengaruhnya ukuran

pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan daerah adalah tidak semua daerah bisa memaksimalkan pendapatannya khususnya pendapatan asli daerah karena belum bisa mengidentifikasi potensi daerah secara menyeluruh.

**Uji F (Uji Simultan)**

Menurut Ghozali (2018) menyatakan bahwa signifikansi bentuk regresi secara simultan diuji dengan mengetahui nilai signifikansi (*sig*) diaman jika nilai *sig* dibawah 0,05 maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Berikut adalah hasil Uji F (Uji Simultan) dalam penelitian ini :

Tabel 8  
Hasil Uji F (Uji Simultan)  
ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,091	3	,030	4,512	,039 <sup>b</sup>
	Residual	,054	8	,007		
	Total	,144	11			

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Daerah

b. Predictors: (Constant), Ukuran Pemerintah Daerah, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah

**Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah**

Hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Pengujian yang digunakan untuk menganalisis hipotesis ini adalah regresi linear berganda dengan melihat hasil Uji F (simultan). Nilai  $F_{tabel}$  dengan tingkat signifikansi  $\alpha = 0,05$  dan  $(df) = (k-1) ; (n-k) = (4-1) ; (12-4) = (3;8)$ . Maka dengan ketentuan tersebut nilai  $F_{tabel}$  adalah sebesar 4,07. Berdasarkan hasil perhitungan hipotesis hasilnya menunjukkan nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  atau  $4,51 > 4,07$  dan nilai *Sig.*  $0,039 < 0,050$ . Maka dapat disimpulkan  $H_{04}$  ditolak dan  $H_{a4}$  diterima yang artinya Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Ukuran Pemerintah Daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Maka hasil hipotesis variable Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah diterima.

**Koefisien Determinasi**

Besarnya koefisien determinasi suatu persamaan regresi mendekati angka 1 maka semakin besar pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Berikut hasil uji koefisien determinasi pada penelitian ini :

Tabel 9 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Squared	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson

1	,79 3 <sup>a</sup>	,629	,489	,0818557	1,789
a. Predictors: (Constant), Ukuran Pemerintah Daerah, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah					
b. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Daerah					

Nilai koefisien derteminasi ( $R^2$ ) sebesar 0,629 atau 62,9%. Hal ini menunjukkan variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel Pendapatan Asli Daerah ( $X_1$ ), Belanja Modal ( $X_2$ ), dan Ukuran Pemerintah Daerah ( $X_3$ ) secara bersamaan dapat menjelaskan hubungan kinerja keuangan daerah kabupaten Ponorogo pada tahun 2010 – 2021 sebesar 62,9% dan sisanya 37,1% mungkin dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel penelitian ini.

## F. PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dijelaskan maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil Pengujian pada hipotesis pertama menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2010 – 2021. Artinya kenaikan Pendapatan Asli Daerah akan mempengaruhi kenaikan kinerja keuangan daerah. Rata-rata Pendapatan Asli Daerah mengalami pertumbuhan positif yaitu sebesar 20,37%, hal tersebut searah dengan hasil Rasio Efektivitas PAD sebagai indikator Kinerja Keuangan Daerah dan menunjukkan hasil rata-rata sangat efektif. Hasil ini memberikan bukti bahwa tingginya Pendapatan Asli Daerah dipengaruhi oleh efektifitas pemerintah daerah dalam penerimaannya.
2. Hasil pengujian pada hipotesis kedua menunjukkan bahwa Belanja Modal berpengaruh negatif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2010 – 2021. Pertumbuhan belanja modal Kabupaten Ponorogo selama 12 tahun mengalami rata-rata nilai yang negatif atau menurun yaitu sebesar 3,52%. Hasil ini menunjukkan bahwa menurunnya belanja modal yang dilakukan pemerintah daerah dapat meningkatkan efektifitas kinerja keuangannya.
3. Hasil pengujian pada hipotesis ketiga menunjukkan bahwa Ukuran Pemerintah Daerah tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2010 – 2021. Hasil ini memberikan penjelasan bahwa besarnya suatu wilayah pemerintah daerah belum bisa menjamin terjadinya penerimaan Pendapatan Asli Daerah akan tinggi karena daerah belum bisa mengidentifikasi potensi pendapatan daerah secara menyeluruh.
4. Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2010 – 2021 ditingkat determinasi sebesar 62,9%. Artinya bahwa seluruh variabel Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Ukuran Pemerintah Daerah apabila mempunyai pergerakan yang sama maka akan memperoleh kenaikan terhadap kinerja keuangan daerah.

## G. DAFTAR PUSTAKA

- Antari, N. G., & Sedana, I. B. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Manajemen Unud*, 7, 1080–1110.

Ayu, P. P. (2018). Analisis PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemda Se-Jawa Barat. *Jurnal Akuntansi & Ekonomi Fe\_Un Pgri Kediri*, 80–96.

Depdagri, Kemendagri Nomor. 690.900.327 Tahun 1996 tentang Pedoman. Penilaian dan Kinerja Keuangan

Febry, T., & Teofilus. (2020). *Aplikasi pada Penelitian Manajemen Bisnis*. Media Sains Indonesia.

Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Universitas Diponegoro.

Halim, A. (2007). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.

Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. UPP STIM YKPN.

Purnomo, R. A. (2016). *Analisis Statistik Ekonomi dan Bisnis dengan SPSS*. CV. WADE GRoUP.

Rai, I. A. (2008). *Audit Kinerja pada Sektor Publik*. Salemba Empat.

Santoso. (2015). *Penelitian Kuantitatif Metode dan Langkah Pengolahan Data*. Umpo Press.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/103888/pp-no-12-tahun-2019>)

Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Beadan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah

Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pasal 1 Angka 20 Undang-undang (UU) tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/195696/uu-no-1-tahun-2022>)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40768/uu-no-32-tahun-2004>)

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40770/uu-no-33-tahun-2004>)

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45950/uu-no-18-tahun-1997>)

<https://koranmemo.com/belasan-pasar-tradisional-rampung-revitalisasi/>

[Ppid.ponorogo.go.id](http://ppid.ponorogo.go.id)

[bppkad.ponorogo.go.id](http://bppkad.ponorogo.go.id)